



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pemahaman Multikulturalisme untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahan Pembicara Untuk Dialog Kebangsaan
Pada Acara Dies Natalis Universitas Negeri Surabaya Dengan
Tema Repositioning Gerakan Mahasiswa, Dalam Menyikapi Realita Kebangsaan
Surabaya, Kamis, 23 Desember 2010

Pemahaman Multikulturalisme:

1. **Multikulturalisme** adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang **ragam kehidupan di dunia**, ataupun **kebijakan kebudayaan** yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keberagaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme dapat juga dipahamni sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik ("politics of recognition"). (Azyumardi Azra, 2007).
2. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai **cita-cita untuk mengembangkan semangat**

kebangsaan yang sama dan mempunyai **kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan** tersebut (A. Rifai Harahap, 2007, mengutip M. Atho' Muzhar).

3. Multikulturalisme bertentangan dengan **monokulturalisme** dan **asimilasi** yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-bangsa (*nation-state*) sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah **kebudayaan baru**. Sedangkan multikulturalisme tidak mencipta kebudayaan-kebudayaan baru, tetapi menghormati adanya **(puncak) kebudayaan-kebudayaan (di daerah)**.
4. Kesadaran multikultur bangsa Indonesia, sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut pernah **dipendam** atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme sempat **ditekan**. Akibatnya sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia rendah. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas, dan mempertegas batas identitas antar individu. Bahkan ada yang juga mempersoalkan masalah asli atau tidak asli. Multikultur baru muncul pada tahun 1980-an yang awalnya mengkritik penerapan demokrasi. Pada penerapannya, demokrasi ternyata hanya berlaku pada kelompok tertentu dan bertentangan dengan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Cita-cita reformasi untuk membangun

Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru.

Multikulturalisme untuk NKRI:

1. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks, dengan berbagai keanekaragaman tersebut, masyarakat kita dikenal dengan istilah **masyarakat multikultural**. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mampu mengorganisasikan dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu, maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang luas untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu.
2. Model **masyarakat multikultural** ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi "**Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah**". Dalam model masyarakat multikultural ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut, yang coraknya seperti sebuah **mozaik**. Didalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, mempunyai kebudayaan seperti sebuah mozaik tersebut.

3. Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari **kondisi sosio-kultural** maupun **geografis** yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.
4. Masyarakat multikultural ini harus dipahami dan memaknai dalam konteks masa kini dan masa depan yang harus terus ditanamkan. Masyarakat multikultural dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah salah satu dari **empat pilar** kehidupan bernegara yakni **Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika**. Pancasila adalah falsafah dan dasar negara yang menjadi landasan ideal bangsa Indonesia. UUD 1945 adalah landasarn konstitusional yang mendasari penyelenggaraan kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. NKRI adalah pemersatu bangsa dan Bhineka Tunggal Ika adalah perekat persatuan dalam untaiam kemajemukan.
5. Inti dari cita-cita tersebut adalah:
 - a. sebuah masyarakat sipil demokratis,
 - b. ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan,
 - c. pemerintahan yang bersih dari KKN,
 - d. terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan
 - e. kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia.

Bangunan Indonesia Baru dari cita-cita reformasi adalah sebuah **"masyarakat multikultural Indonesia"** dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak **"masyarakat"** (plural society), sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika **bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.**

Tantangan

1. Akhir-akhir ini, intensitas dan ekstensitas konflik sosial di tengah-tengah masyarakat terasa kian meningkat. Terutama konflik sosial yang bersifat horisontal, yakni konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik berdimensi vertikal, yakni antara masyarakat dan negara. Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiah. Hanya saja, persoalannya menjadi lain jika konflik sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi destruktif bahkan anarkis. Itulah yang banyak kita jumpai didalam era reformasi ini yang sangat memperhatikan.
2. Di era demokratisasi yang mengagungkan keterbukaan, sejumlah konflik sosial dalam masyarakat telah berubah menjadi destruktif bahkan cenderung anarkhis. Kasus Ambon, Poso, Maluku, GAM di Aceh, Papua, dan berbagai kasus yang menyulut kepada konflik yang lebih besar dan berbahaya. Konflik sosial berbau SARA (agama) ini

tidak boleh dianggap remeh dan harus segera diatasi secara proporsional agar tidak menciptakan disintergrasi bangsa.

3. Apakah fenomena konflik sosial ini merupakan peristiwa yang bersifat insidental dengan motif tertentu dan kepentingan sesaat, ataukah justru merupakan budaya dalam masyarakat yang bersifat laten. Realitas empiris ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masih ada problem yang mendasar yang belum terselesaikan.
4. Ketidakadilan masyarakat semakin terasa manakala hidup makin sulit, pekerjaan susah didapat oleh sebagian masyarakat yang menimbulkan kemiskinan, sementara ada masyarakat yang hidup lebih dari berkecukupan,--menimbulkankecemburuan sosial.

Penutup

1. Mencermati gejala-gejala ini, marilah kita pupuk solidaritas sosial yang akan menjadi perekat dalam mempersatukan dan memberikan pondasi bagi jatidiri kita sebagai bangsa.
2. Mudah-mudahan poin-poin yang saya kemukakan pada forum ini, mendapat respon untuk dikembangkan lebih lanjut dalam dialog ini.
3. Sekian terimakasih.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie